

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pemilu dalam negara demokrasi Indonesia merupakan suatu proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi. Prinsip-prinsip dalam pemilihan umum yang sesuai dengan konstitusi antara lain prinsip kehidupan ketatanegaraan yang berkedaulatan rakyat (demokrasi) ditandai bahwa setiap warga negara berhak ikut aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan<sup>1</sup>

Sebuah negara berbentuk republik memiliki sistem pemerintahan yang tidak pernah lepas dari pengawasan rakyatnya. Adalah demokrasi, sebuah bentuk pemerintahan yang terbentuk karena kemauan rakyat dan bertujuan untuk memenuhi kepentingan rakyat itu sendiri. Demokrasi merupakan sebuah proses, artinya sebuah republik tidak akan berhenti di satu bentuk pemerintahan selama rakyat negara tersebut memiliki kemauan yang terus berubah.

Ada kalanya rakyat menginginkan pengawasan yang superketat terhadap pemerintah, tetapi ada pula saatnya rakyat bosan dengan para wakilnya yang terus bertingkah karena kekuasaan yang seakan-akan tak ada batasnya. Berbeda dengan monarki yang menjadikan garis keturunan sebagai landasan untuk memilih

---

<sup>1</sup>Nurul, 9 Juni 2015. Makalah Sistem Pemerintahan Indonesia. <https://nurul203.wordpress.com/sistem-pemerintahan-indonesia> diakses pada tanggal 10 April 2016 pukul 20.05 WIB

pemimpin, pada republik demokrasi diterapkan azas kesamaan di mana setiap orang yang memiliki kemampuan untuk memimpin dapat menjadi pemimpin apabila ia disukai oleh sebagian besar rakyat. Pemerintah telah membuat sebuah perjanjian dengan rakyatnya yang ia sebut dengan istilah kontrak sosial. Dalam sebuah republik demokrasi, kontrak sosial atau perjanjian masyarakat ini diwujudkan dalam sebuah pemilihan umum. Melalui pemilihan umum, rakyat dapat memilih siapa yang menjadi wakilnya dalam proses penyaluran aspirasi, yang selanjutnya menentukan masa depan sebuah negara.

Politik secara umum sering didefinisikan sebagai ilmu dan sebagai seni maupun praktik tentang pemerintahan yang didalamnya terdapat aspek kekuasaan, atau perlawanan-perlawanan. Konsep politik ini hampir selalu dihubungkan dengan pemerintahan negara. Ketika berbicara politik, orang kemudian merujuk pada partai politik, lembaga eksekutif atau legislatif. Padahal pada dasarnya, manusia adalah *homo politicus*, yang berarti bahwa mereka memiliki kecenderungan berpolitik dalam kehidupan sehari-hari. Mereka mempraktikkan perjuangan, perlawanan, pertentangan, kompetisi, serta strategi-strategi untuk mencapai tujuan tertentu. Selalu terjadi hubungan kekuasaan antara aktor-aktor sosial yang berbeda dalam masyarakat dalam bentuk hubungan individual maupun kolektif baik secara vertikal maupun horizontal.

Politik adalah unsur yang penting dalam pemerintahan suatu negara. Politik merupakan sebuah aspek utama yang memegang pengaruh terhadap bidang-bidang lainnya, baik itu pendidikan, ekonomi, keamanan dan lain-lain. Konsep politik tersebut

mengacu pada hubungan kekuasaan yang lebih luas, tidak hanya pada tataran elit politik, tapi pada masyarakat umum dengan berbagai kategori berbeda yang terimplikasi di dalamnya misalnya gender, kelas, golongan usia, etnisitas, dan sebagainya.

Gender menjadi aspek dominan dalam definisi politik tersebut. dalam relasi kelas, golongan usia maupun etnisitas, gender juga terlibat di dalamnya. Hubungan gender dengan politik dapat ditemukan mulai dari lingkungan keluarga antara suami dan istri sampai pada tataran kemasyarakatan yang lebih luas, misalnya dalam politik praktis. Tataran hubungan kekuasaan itu bervariasi, mulai dari tataran simbolik, dalam penggunaan bahasa dan wacana sampai pada tataran yang lebih riil dalam masalah perburuhan, migrasi, kekerasan, tanah, dan keterwakilan perempuan dalam politik.

Kehadiran sosok perempuan dalam panggung kontestasi politik Indonesia, baik pada pemilihan umum (pemilu) nasional maupun pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) di daerah-daerah, kian tampak nyata. Kehadiran sosok perempuan itu tak bisa disangkal dan dipungkiri telah ikut meramaikan dan mewarnai dinamika politik. Di daerah-daerah di mana pemilukada berlangsung sejumlah nama dan gambar tokoh perempuan muncul terpampang di ruang-ruang publik: disosialisasikan. Mereka menawarkan diri dan atau ditawarkan sebagai alternatif pemimpin pemerintahan, berusaha memberi dan menumbuhkan harapan, dan tidak jarang memancing serta menjadi bahan perbincangan di berbagai kalangan. Di antara sosok-sosok yang tampil ada yang sekadar meramaikan sampai pada tahapan

nomipasi, ada yang berhasil lanjut ke tahap kandidasi, bahkan ada yang telah berhasil memenangi kontestasi.

Kehadiran sejumlah sosok perempuan dalam kontestasi politik di daerah-daerah dapat dikatakan sebagai fenomena baru, seiring dengan arus demokratisasi yang kian menguat hingga ke daerah-daerah. Boleh jadi fenomena ini merupakan kecenderungan yang akan terus menguat, sebagai buah dari terus menguatnya gerakan dan tuntutan, serta meluasnya kesadaran tentang kesetaraan gender. Ruang dan jabatan politik kian terbuka, tidak boleh lagi ditutup-tutupi, tidak boleh lagi diperuntukkan eksklusif bagi laki-laki, dan tidak boleh ditabukan bagi perempuan. Perempuan berhak dan berpotensi memberikan kontribusi di arena politik. Namun demikian, tetap saja fenomena makin banyaknya sosok perempuan dalam kontestasi politik di daerah telah memancing diskusi, perdebatan, dan tak jarang masih menyisakan keraguan, khususnya yang terkait dengan kapasitas kontributif perempuan dalam memajukan demokrasi, mengendalikan dinamika politik, dan mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat.

Berbicara tentang perempuan dan politik, tidak lepas dari gambaran perempuan dalam relasi masyarakat. Gambaran sosok perempuan yang ada dalam benak masyarakat di dunia politik, bahwa perempuan “tidak layak” memimpin karena perempuan tidak rasional dan lebih mengandalkan emosinya. Pandangan yang bersumber dari penilaian dan keyakinan gender inilah yang akhirnya menimbulkan ketimpangan gender diberbagai sektor, terutama di bidang politik. Kesempatan

perempuan di politik sebenarnya ada dan memungkinkan, namun karena pandangan dan berbagai faktor itu jarang sekali terjadi.

Faktor utama adalah pandangan dan penilaian bahwa dunia politik adalah dunia publik yang keras, dunia yang memerlukan akal, dunia yang penuh debat, yang membutuhkan pikiran-pikiran cerdas, yang semuanya itu di asumsikan milik laki-laki bukan perempuan. Perempuan tidak pantas berpolitik karena perempuan “penghuni” dapur, tidak bias berpikir rasional, dan kurang berani mengambil resiko, yang semuanya itu sudah menjadi penilaian terhadap perempuan. Akibatnya, baik perempuan atau laki-laki atau masyarakat umum, sudah berpikiran atau ber”*mainset*” bahwa dunia publik (politik) milik laki-laki sedangkan dunia domestik milik perempuan.

Faktor lain adalah ketimpangan-ketimpangan gender yang berakar dari sosial budaya mengakibatkan jumlah perempuan mencapai jenjang pendidikan tinggi lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Akibatnya, perempuan tidak mempunyai pengetahuan yang memadai dan tidak bisa berkiprah dalam dunia politik. Selain itu, pemahaman politik di kalangan perempuan juga masih rendah, mengingat dunia politik adalah “milik laki-laki”, maka masyarakat memandang tidak perlu member pemahaman politik pada kaum perempuan.

Gambaran peran perempuan di dunia publik yang terkait dengan politik secara statistik masih belum mengembirakan. Hal itu dapat dicermati dari hasil pemilu dari tahun ke tahun. Peran perempuan di bidang politik, termasuk pucuk pimpinan penentu kebijakan di pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah, desa



sekalipun, masih didominasi kaum pria, bukan berarti tokoh politik perempuan dan pemimpin perempuan tidak ada, namun jumlahnya masih sangat jauh dari imbangan dengan jumlah pemimpin dan tokoh politik laki-laki. Padahal, secara statistik jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki.

Minimnya jumlah perempuan sebagai penentu kebijakan politik, menyebabkan keputusan mengenai kebijakan umum yang mempengaruhi kesejajaran perempuan masih dipegang oleh laki-laki, yang sebagian besar masih meng-*image*-kan bahwa politik tidak cocok untuk perempuan, bahkan dalam tulisan Vicky Randall (1982)<sup>2</sup> mengidentifikasi bahwa jika jumlah perempuan lebih banyak dalam proses pengambilan keputusan, maka fokus kehidupan politik juga akan berubah. Dampak yang paling jelas adalah akan terjadinya perluasan cakupan politik ke arah masalah-masalah dan isu-isu yang semula dianggap bukan isu politik seperti kesejahteraan anak, perlindungan terhadap perempuan, dan lainnya.

Pada tahun 2015, kita telah siap melaksanakan Pilkada serentak di seluruh daerah di Indonesia. Perhelatan akbar pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang digelar pada tanggal 9 Desember 2015. Sebanyak 264 wilayah memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang meliputi 8 pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 221 pemilihan bupati dan wakil bupati, serta 35 pemilihan wali kota dan

---

<sup>2</sup> Nurhamni, 2009, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Perempuan Beraktifitas Dalam Partai Politik" Jurnal ACAMEDIA Fisip Untad, vol 1, 2009, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=167284&val=6118&title=FAKTOR%20FAKTOR%20YANG%20MEMPENGARUHI%20MOTIVASI%20PEREMPUAN%20BERAKTIVITAS%20DALAM%20PARTAI%20POLITIK> diakses pada tanggal 2 Agustus 2016, pukul 21.25 WIB

wakil walikota. Namun, kontestasi akbar tersebut belum banyak melibatkan kaum perempuan.

Dalam perhelatan tersebut menunjukkan, bahwa dari 1.654 calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, hanya 123 perempuan (7,44) yang mengikuti pilkada tersebut. Proposi representasi perempuan ini belum beranjak jauh dari proporsi saat pilkada langsung pertama kali dilaksanakan pada 2005, sekitar 69 orang dari 1.374 peserta hanya sekitar 5,02 persen.<sup>3</sup>

Begitupun di daerah Sumatera Barat, dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada 13 kabupaten/kota di propinsi Sumatera Barat, Ir. Hj. Rahmi Brisma menjadi satu-satunya kaum hawa yang menjadi calon wakil walikota Bukittinggi dalam Pilkada serentak. Tidak hanya itu dari 42 pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, Rahmi Brisma memantapkan diri untuk menjadi calon wakil walikota perempuan yang ikut dalam perhelatan besar tersebut, yaitu sebagai calon wakil walikota kota Bukittinggi 2015. Rahmi Brisma sangat antusias sekali dan berani untuk maju menjadi calon wakil walikota Bukittinggi 2015 di tengah sedikitnya representasi perempuan di politik. Rahmi Brisma sangat yakin dengan banyaknya dukungan yang disampaikan kepadanya, sehingga membuat ia semakin teguh dan termotivasi untuk maju menjadi calon wakil walikota demi kemajuan kota Bukittinggi.

---

<sup>3</sup> Retno Setyowati. 5 januari 2016, "perempuan dalam pilkada serentak 2015". [Print.kompas.com/2016/01/05/Perempuan-dalam-pilkada-serentak](http://Print.kompas.com/2016/01/05/Perempuan-dalam-pilkada-serentak) diakses pada tanggal 14 april 2016, pukul 22.10 WIB

Ir. Hj. Rahmi Brisma, yang dikenal dengan “Buk Rahmi” lahir di Sibolga pada tanggal 29 September 1965. Beliau sekarang tinggal di Jl. Sumurapak No. 6 A RT/RW 004/005 Kelurahan Tarok Dipo Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi. Riwayat pendidikan beliau, Pendidikan Formal : SD Muhammadiyah Sibolga (1972-1978), SMP Muhammadiyah Jakarta Pusat (1978-1981), SMA Negeri 1 Bukittinggi (1981-1984), Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (1992), Pasca Sarjana Universitas Negeri Padang. Pendidikan Informal : Orientasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pendalaman Kopetensi Legislatif Anggota DPRD.

Pengalaman Pekerjaan Ir. H. Rahmi Brisma : Dosen (1993 – 1994), Anggota DPRD Kota Bukittinggi (1999 – 2004), Wakil Ketua DPRD Kota Bukittinggi (2004 - 2009), Direktur PT. Brisma Propertindo. Pengalaman Organisasi Ir. H. Rahmi Brisma : anggota Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), anggota Pelajar Islam Indonesia (PII) Pengurus Daerah Jakarta Pusat, anggota Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), anggota Aisyah, pengurus Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Bukittinggi, pengurus KPPI. Beliau merupakan putri dari Buchari R.is asal Simabur Batu Sangkardan Ibu Syamsiar asal Paraman Ampalu, Pasaman. Suami Beliau H. Onlivir putra asli Tigo Baleh, Bukittinggi.

Majunya Rahmi Brisma dalam Pilkada tidak terlepas dari motivasinya untuk menjadi calon wakil walikota Bukittinggi 2015. Untuk memahami pengertian motivasi tersebut maka dapat diungkapkan beberapa pendapat dari para ahli antara



lain George Terry dalam Hasibuan (2003)<sup>4</sup> menyatakan bahwa “motivasi adalah keinginan yang terdapat pada diri seseorang individu yang merangsangnya untuk melakukan tindakan-tindakan. Kemudian diperjelas oleh Hasibuan bahwa motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang, agar mereka mau bekerjasama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala daya dan upayanya untuk mencapai kepuasan. Dengan adanya beberapa pengertian tersebut diatas, maka dapat dikatakan motivasi merupakan salah satu unsur yang dapat menjelaskan perilaku seseorang.

Ilmu politik yang mempelajari antara lain pembagian kekuasaan dan tugas antara berbagai lembaga politik, seperti lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif, sedemikian rupa sehingga proses penyelenggaraan roda pemerintahan negara berlangsung berdasarkan asas-asas demokrasi. Pengertian politik tidak lagi terbatas hanya pada percaturan kekuasaan dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara, akan tetapi sudah bergeser menjadi pengertian percaturan kekuatan dan pengaruh organisasional.<sup>5</sup>

Percaturan kekuatan, kekuasaan atau pengaruh sangat menentukan bukan hanya dalam bentuk motivasi yang digunakan oleh seseorang atau kelompok pimpinan dalam menggerakkan para bawahannya yang berarti menggunakan faktor-faktor motivasional yang bersifat ekstrinsik akan tetapi juga motivasi intrinsik yang bersumber dari dalam diri orang yang bersangkutan dalam berkarya. Dengan kata lain,

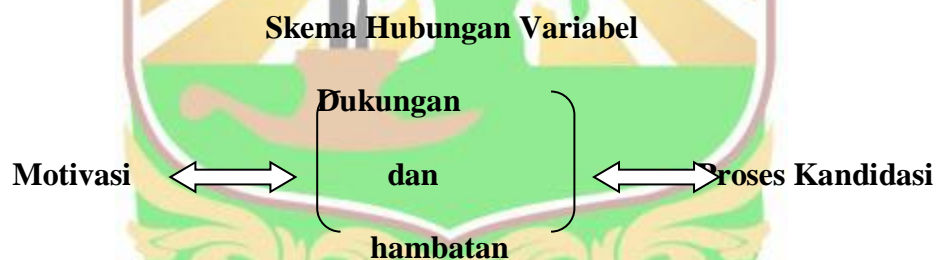
---

<sup>4</sup> Nurhamni, *op, cit.*

<sup>5</sup> Sondang P. Siagian, *Teori Motivasi dan Aplikasinya*. (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004), hal. 44-45

pemahaman teori motivasi secara tepat dan aplikasinya dalam kehidupan organisasional akan mendatangkan hasil yang diharapkan apabila dibarengi dengan pemahaman dan pemanfaatan teori yang dikembangkan oleh ilmu politik.<sup>6</sup>

Dalam penelitian ini motivasi dan proses kandidasi dalam pilkada haruslah dibaca saling mengandaikan atau tidak dapat dibaca secara terpisah. Apapun motivasi Ir. H. Rahmi Brisma untuk maju dalam pilkada hanya mungkin teraktualisasi melalui keberhasilannya dalam mengelola proses kandidasi. Sementara mengelola proses kandidasi mencakup dua dimensi yang saling berlawanan, yaitu dukungan (support) dan hambatan (obstacles). Secara skematik hubungan antara variabel motivasi, proses kandidasi, dan dukungan dapat digambarkan sebagai berikut:<sup>7</sup>



Skematika di atas menyiratkan bahwa dukungan dan hambatan pada proses kandidasi dalam pilkada merupakan ruang yang dipergunakan oleh Rahmi Brisma untuk mengaktualisasikan motivasinya. Ruang ini dapat juga diterjemahkan sebagai ruang kesempatan politik dalam pilkada. Dengan adanya kesempatan politik tersebut

<sup>6</sup> *ibid*

<sup>7</sup> Tim Peneliti Departemen Ilmu Politik Airlangga FISIP UNAIR, *Op,cit.*, hal 10.

maka munculah motivasi politik Rahmi Brisma untuk menjadi calon wakil walikota Bukittinggi 2015.

## B. Perumusan Masalah Penelitian

Kiprah perempuan di ruang publik masih mengalami kebuntuan, bahkan angka keterwakilan perempuan di parlemen ataupun yang bergelut dibidang politik turut memprihatinkan. marginisasi perempuan, kuatnya akar budaya patriaki masyarakat, perempuan intrik dengan urusan rumah, kompetensi yang masih rendah dan berbagai kelemahan lainnya menjadikan mereka terpinggirkan dalam arena politik.

Dari latar belakang diatas, sedikitnya peran perempuan dalam politik terbukti dalam Pilkada Sumatera Barat yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015, hanya satu orang perempuan yang mendaftar dalam pilkada tersebut, yaitu Ir. Hj. Rahmi Brisma yang juga merupakan mantan wakil walikota kota Bukittinggi periode 2004-2009.

**Tabel 1.1**  
**Pasangan Calon Pilkada Serentak Sumatera Barat 2015<sup>8</sup>**

No.	Daerah	Nama Pasangan Calon	Partai Pendukung
1	Provinsi Sumbar	Irwan Prayitno – Nasrul Abit	Pks, Gerindra
		Muslim Kasim – Fauzi Bahar	Nasdem, PDIP, PAN, Hanura
2	Kota Bukittinggi	Ramlan – Irmadi	Calon Perseorangan
		Taslim Caniago – Marfendi	PAN, PKS
		Ismet Amziz – Zulbahri	Demokrat, PDIP,

<sup>8</sup>Andri El Faruqi. 29 juli 2015. <https://m.tempo.com/42-pasang-calon-bertarung-di-Pilkada-Sumatera-Barat-2015> diakses pada tanggal 21 April 2016, pukul 14.20 WIB

		Majid	Gerindra
		<b>Harma Zaldi – Rahmi Brisma</b>	Nasdem, Golkar
		Febby – Zulfikar Rahim	PKB, PPP
3	Kab. Agam	Indra Catri – Trinda Farhan	Gerindra, PKS
		Irwan Fikri – Chairunnas	PAN, Demokrat, Hanura
4	Kab. Pasaman Barat	Syahiran – Yulianto	Gerindra, Demokrat
		Hamsuardi – Kartuni	Hanura, PAN, PKS
		Zulkenedi Sad – Risnawanto	Golkar, PDIP, Nasdem
5	Kab. Pasaman	Beni Utama – Deni Lubis	Golkar, PKS, Gerindra, PDIP, PAN, PKB, Hanura
		Yusuf Lubis – Atos Pratama	Nasdem, Demokrat
6	Kab. Tanah Datar	Syaherdam – Sultani	PKS, Hanura
		Irдинansyah T. –Zulfandri Darma	Golkar, Nasdem
		Nelson Darwin – Muzwar	Demokrat, PPP, PDIP
		Edi Darman – Taufik Idris	Gerindra, PAN
7	Kab. Lima Puluh Kota	Rifa Yendi – Zuhikmi	Calon Perseorangan
		Asyirwan Yunus –Ilson Cong	Gerindra, PAN, Nasdem
		Azwar Chesputra – Yunirwan	Golkar, Hanura, Demokrat, PKS, PBB
		Irfendiar Arbi –Ferizal Ridwal	PDIP, PPP, PKB
8	Kab. Padang Pariaman	Ali Mukhni – Suhatri Bur	Golkar, Gerindra, PKS, Demokrat, PKB, PPP, PAN
		Alfikri Muklis – Yulius Danil	PDIP, PPP, PAN
9	Kota Solok	Zul Elfian – Reiner	Nasdem, PBB, PKPI
		Irzal Ilyas – Alfauzi Boto	Demokrat, PKS, Hanura
		Ismed Koto – Jon Hendra	PAN, Gerindra



10	Kab. Solok	Desra – Bachtul	Nasdem, PAN, Hanura
		Gusmal – Yulfandri Nurdin	Gerindra, PKS
		Agus Syahdeman – Wahidup	Demokrat, PDIP
11	Kab. Solok Selatan	Boy Iswarmen–Fahril Murad	Calon Perseorangan
		Muzni Zakari – Abdul Rahman	Gerindra, PAN, PKS, Nasdem
		Khairunas – Edi Susanto	Golkar,PKPI,PKB,Hanur
12	Kab. Sijunjung	Mukhlis Anwar – Mayetrinaldi	Demokrat, PAN
		Yuswir Arifin – Ariral Boy	PDIP,Nasdem,Golkar,PB B
		Ashelfin – Alfian Kasir	PPP, Hanura,PKS
13	Kab. Dharmasraya	Sutan Riska – Amrizal	PDIP,Hanura, PAN
		Adi Gunawan – Jhonson Putra	Demokrat,Nasdem,Golk ar
14	Kab. Pesisir Selatan	Hendra Joni – Rusma Yul Anwar	Nasdem, Gerindra,PAN
		Editiawarman – Bakri Bakar	Hanura,PDIP,PBB,PKB
		Burhanuddin – Novel Anas	PPP, Demokrat
		Aliman Sori – Raswin	PKS, Golkar

Sumber : <https://m.tempo.com/42-pasang-calon-bertarung-di-Pilkada-Sumatera-Barat-2015>

Mantan Wakil Ketua DPRD Bukittinggi periode 2004-2009 ini, maju sebagai calon Wakil Walikota Bukittinggi berpasangan dengan Harma Zaldi yang juga merupakan mantan wakil walikota Bukittinggi periode 2010-2015. Pasangan calon walikota dan wakil walikota ini di usung oleh partai Golkar dan Nasdem. Majunya pasangan Harma Zaldi dan Rahmi Brisma dalam pilkada Bukittinggi 2015 diprediksi

bakal mendominasi suara perempuan. Pasalnya, Rahmi Brisma adalah satu-satunya calon wakil walikota perempuan, dari lima pasangan calon yang maju di pilkada Bukittinggi 2015. Rahmi Brisma optimis dengan *basic* pengalaman selama dua periode di lembaga legislatif dan pengalamannya sebagai pengusaha selama ini akan mampu memimpin kota perjuangan ini. Kekuatan hati seorang wanita ditunjang dengan program masyarakat yang akan diusung dalam visi dan misi pasangannya, akan bisa membawa Bukittinggi lebih maju.

Persoalan motivasi memang terkesan tidak terlalu penting bagi sebagian orang, akan tetapi motivasi juga mempengaruhi proses dan hasil. Motivasi dan hasil memiliki korelasi yang kuat karena motivasi menjadi modal awal bagi seseorang kandidat dalam mencapai hasil tersebut. Semakin kuat motivasi seseorang maka semakin kuat dan keras pula upaya atau langkah-langkah yang dilakukan untuk memperoleh hasil maksimal dalam persaingan politik. Begitupun sebaliknya, semakin lemah dorongan dalam diri seorang kandidat maka semakin lemah pula upaya yang dilakukan untuk pertarungan tersebut. Oleh karena itu motivasi menjadi sangat penting karena motivasi akan menentukan langkah-langkah politik yang diambil pada tahap berikutnya, bahkan lebih jauh motivasi mempengaruhi strategi maupun marketing yang akan dilakukan dan sebelum kandidat memiliki strategi dan marketing sudah pasti memiliki motivasi tersendiri.

Memilih untuk maju menjadi wakil walikota dalam Pilkada merupakan keputusan penting dan penuh pertimbangan. Tidak hanya menghitung kapasitas diri tetapi juga viabilitas di luar dirinya yang dapat mempengaruhi upaya untuk

memenangkan pilkada. Karena penelitian ini tidak bertujuan untuk mencari tahu bagaimana kandidat perempuan memenangkan pilkada. Maka penceritaan atas motivasi dan dukungan Ir. H. Rahmi Brisma dalam pilkada (proses kandidasi) menjadi topik pembahasan utama.

Sedikitnya peran perempuan dalam politik terbukti dalam Pilkada Sumatera Barat yang dilaksanakan pada 09 Desember 2015 kemarin, hanya satu orang perempuan yang mendaftar dalam Pilkada tersebut, yaitu Rahmi Brisma yang juga merupakan mantan Wakil Ketua DPRD Bukittinggi periode 2004-2009. Dari uraian diatas maka timbul pertanyaan bagi peneliti, bagaimana (apa) motivasi Ir. Hj. Rahmi Brisma Menjadi Calon Wakil Walikota Bukittinggi pada Pilkada Sumatera Barat 2015?.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengeksplorasi dan mendapatkan gambaran tentang motivasi Ir. Hj. Rahmi Brisma menjadi calon wakil walikota kota Bukittinggi pada Pilkada Sumatera Barat 2015.

### **D. Signifikasi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara akademis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

#### **1. Secara Akademis**

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap kajian ilmu politik, khususnya motivasi perempuan. Penelitian ini

juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak lain yang ingin melakukan penelitian terkait motivasi perempuan di ranah politik. Sehingga dengan demikian hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu sosial dan ilmu politik.

## 2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan saran dan gambaran kepada pemerintah tentang motivasi perempuan di ranah politik. Sehingga pemerintah dapat mengambil langkah yang tepat dalam merespon situasi dan kondisi yang ada pada saat ini. Penelitian ini juga diharapkan menjadi gambaran bagi kaum perempuan yang memasuki ranah politik. Dengan demikian perempuan mempunyai motivasi dan persiapan yang baik berkiprah dalam dunia politik

